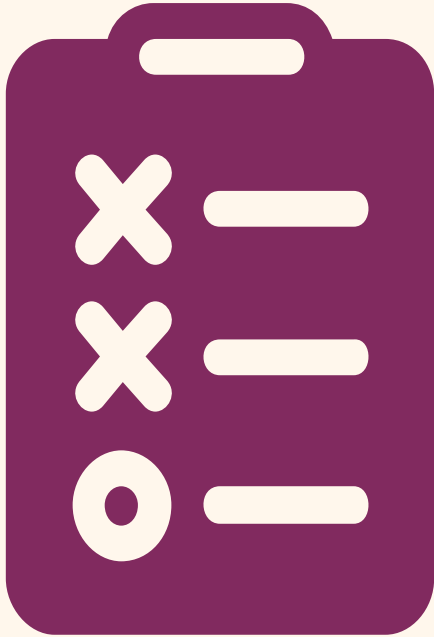


PERSIAPAN VERIFIKASI DAN AKREDITASI PBHI WILAYAH

Zoom Meeting, 19 Februari 2021



SUSUNAN ACARA



- Pengantar verasi, manfaat dan pengalaman verasi
- Penyampaian timeline
- Penyampaian syarat dan mekanisme verasi
- Pemetaan verasi untuk PBHI Wilayah
- Identifikasi syarat untuk persiapan verasi bagi PBHI Wilayah

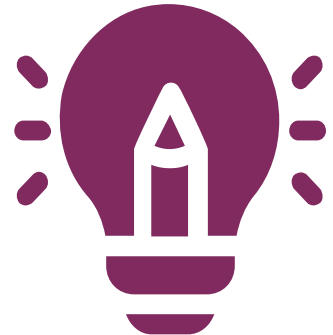
VERIFIKASI DAN AKREDITASI

- **Verifikasi:** pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh OBH.
- **Akreditasi:** pengakuan terhadap OBH yang diberikan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi setelah dinilai bahwa OBH tersebut layak untuk memberikan Bantuan Hukum.
- **Perpanjangan sertifikasi:** proses verifikasi dan akreditasi kembali terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi pada periode akreditasi sebelumnya (3 tahun).

Permohonan dilakukan secara ELEKTRONIK

UPDATE

- Target peningkatan jumlah Pemberi Bantuan Hukum
- Diseminasi dan penjangkaran yang dilakukan Kanwil Kemenkumham



SYARAT DOKUMEN

- a. Surat Keputusan Badan Hukum dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Akta pendirian OBH;
- c. Akta pengurus OBH;
- d. Surat penunjukan sebagai advokat pada OBH;
- e. Surat izin beracara sebagai advokat yang masih berlaku
- f. Berita acara sumpah advokat;
- g. Status kepemilikan kantor;
- h. Foto kantor secara keseluruhan luar dan dalam;
- i. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama OBH;
- j. Nomor Rekening atas nama OBH;
- k. Surat keterangan tinggal/domisili dari lurah atau kepala desa tempat OBH berada;
- l. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- m. Laporan pengelolaan keuangan; dan
- n. Bukti kasus litigasi dan data pelaksanaan kegiatan nonlitigasi.

PBH AKREDITASI C

- 1) Jumlah kasus litigasi yang ditangani terkait dengan orang miskin paling sedikit 1 tahun sebanyak 10 kasus;
- 2) Jumlah kegiatan nonlitigasi paling sedikit 3 kegiatan;
- 3) Jumlah advokat paling sedikit 1 orang dan paralegal paling sedikit 3 orang;
- 4) Pendidikan formal dan nonformal dari advokat paling rendah strata 1 dan paralegal telah mengikuti pelatihan paralegal;
- 5) Jangkauan penanganan kasus atau lingkup wilayah provinsi dan kabupaten/kota;
- 6) Status kepemilikan dan sarana prasarana kantor;
- 7) Kepengurusan lembaga;
- 8) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- 9) Laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi;
- 10) Nomor Pokok Wajib Pajak OBH; 11) Jaringan yang dimiliki OBH.

**Periode penanganan kasus:
2 tahun terakhir***

IDENTIFIKASI PBHI WILAYAH

Sudah Terakreditasi:

1. PBHI Sulawesi Selatan
2. PBHI Sumatera Barat
3. PBHI Lampung
4. PBHI Yogyakarta

Belum Terakreditasi:

1. PBHI DKI Jakarta
2. PBHI Jawa Barat
3. PBHI Bali
4. PBHI Kalimantan Barat
5. PBHI Sumatera Utara
6. PBHI Jawa Tengah



IDENTIFIKASI KELENGKAPAN BERKAS

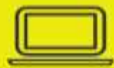
- NPWP
- Nomor rekening PBHI Wilayah
- Foto kantor luar dalam
- Laporan keuangan
- Status kepemilikan kantor
- Keterangan domisili kantor
- Bukti kasus litigasi (10 kasus) dan data pelaksanaan nonlitigasi (3 kegiatan) dalam 2 tahun

TIMELINE VERASI



VERIFIKASI DAN AKREDITASI (VERASI) CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM (PBH BARU)

**Pendaftaran Calon
Pemberi Bantuan
Hukum
(Verasi :
•Administrasi
•Dokumen Fisik)**



**15 hari
(04 Maret –
26Maret 2021)**

**Perbaikan
Ketidaklengkapan
Dokumen Verasi**



**14 hari
(Paling lambat
selesai
16 April 2021)**

**Pemeriksaan
Faktual/Survey
Lapangan**



**14 hari
(Paling Lambat
selesai
6 Mei 2021)**

**Rekomendasi
Pokjada**



**1 hari
(7 Mei 2021)**

Verasi Pusat



**14 hari
(Paling lambat
selesai
18 Juni 2021)**

**Rekomendasi
Kelolosan PBH Baru**



**7 hari
(21 Juni – 29 Juni
2021)**

TIMELINE PERPANJANGAN SERTIFIKASI



Syarat dan Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi



**PENGUMUMAN
VERIFIKASI DAN AKREDITASI
CALON PEMBERI BANTUAN HUKUM
PERIODE TAHUN 2022 - 2024**



Kementerian Hukum dan HAM RI, menyampaikan pengumuman waktu pendaftaran bagi Organisasi Bantuan Hukum yang ingin mendaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum periode akreditasi tahun 2022 s.d. 2024. Organisasi Bantuan Hukum yang mendaftar akan dilakukan verifikasi dan akreditasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan peraturan pelaksanaannya.

PERSYARATAN

1. Berbadan Hukum;
2. Mempunyai Kantor atau Sekretariat tetap;
3. Memiliki Pengurus yang meliputi Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota;
4. Memiliki Program Bantuan Hukum;
5. Memiliki minimal 1 (satu) Advokat yang memiliki izin beracara yang sah dan berlaku;
6. Memiliki minimal 3 (tiga) Paralegal yang aktif;
7. Lainnya sesuai Permenkumham No. 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan (diunduh di www.sidbankum.bphn.go.id).

TATA CARA PENDAFTARAN
Mengajukan pendaftaran melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id.

WAKTU PENDAFTARAN
Pendaftaran dimulai tanggal 04 Maret s.d. 26 Maret 2021.

TAHAP-TAHAP SELEKSI

1. Pendaftaran Calon Pemberi Bantuan Hukum dilakukan secara online melalui Aplikasi Verasi dalam situs www.sidbankum.bphn.go.id dengan klik "Daftar Verasi";
2. Pemeriksaan Administrasi oleh Kelompok Kerja Daerah terhadap berkas-berkas pendaftaran yang telah diinput dilakukan melalui Aplikasi Verasi;
3. Pemeriksaan Dokumen Fisik dilakukan dengan cara Calon Pemberi Bantuan Hukum datang langsung ke Kantor Wilayah Kemenkumham RI guna melakukan pencocokan antara dokumen pendaftaran yang diisi pada aplikasi dan fotokopi dokumen terlegalisir dengan dokumen aslinya;
4. Pemeriksaan Faktual dilakukan melalui survey lapangan terhadap Calon Pemberi Bantuan Hukum yang dilakukan oleh Panitia Verifikasi dan Akreditasi bersama Kelompok Kerja Pusat dan Kelompok Kerja Daerah atau masing-masing;
5. Penetapan Akreditasi hanya akan dilakukan terhadap calon Pemberi Bantuan Hukum yang telah dinyatakan lolos Pemeriksaan Administrasi, Dokumen Fisik, dan Faktual;
6. Pemberian Sertifikat bagi Pemberi Bantuan Hukum yang lolos Verifikasi dan Akreditasi periode tahun 2022 s.d. 2024;

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat.

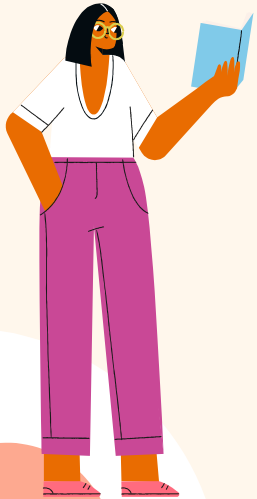
Demikian disampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.





[bphn_kemkumham](https://t.me/bphn_kemkumham) [bphn_kemkumham](https://www.facebook.com/bphn_kemkumham) [bphn_kemkumham](https://twitter.com/bphn_kemkumham) [bphntu official](https://www.youtube.com/channel/UCqBtntu1f0f0f0f0f0f0f0f0) www.bphn.go.id

PERPANJANGAN SERTIFIKASI



- Pembukaan cabang
- Peningkatan akreditasi



Julius Ibrani



Sekretariat Nasional PBHI



Abdul Aziz Saleh



Saktya Restu Baskara



Totok Yuliyanto



Kahar Muamalsyah



astro parianghan



Ihsan Riswandi



Rikson Siahaan_KALBAR



Adiku



Rachmat Sukarno



arnot hutasoit



BPW PBHI LAMPUNG PBHI B...



Totok Yuliyanto



Adi Sumiarta



Chikita Edrini Marpaung